

Peran ASEAN dalam Mempromosikan Perdamaian dan Hak Asasi Manusia di Myanmar (2020-2023)

Ari Setyowati¹ & Ahmad Khoirul Umam²

¹. Kementerian Hukum Republik Indonesia

². Paramadina Graduate School of Diplomacy (PGSD), Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

ARTICLE INFO:

Paper Type:

Research Paper

Keywords:

Myanmar, kudeta militer, ASEAN, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM), Asia Tenggara

Article History

Received: 6 August 2025

Revised: 6 October 2025

Accepted: 3 January 2026

Available online: 3 March 2026

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

ABSTRACT

Selama puluhan tahun pasca kemerdekaannya pada 1948 dari kolonialisme Inggris, Myanmar telah berjuang melawan kekuasaan militer, konflik antar suku, pemerintahan yang buruk dan kemiskinan yang meluas. Transisi dari pemerintahan otoriter ke pemerintahan demokratis yang dimulai pada tahun 2011 memicu harapan akan reformasi demokrasi. Namun dominasi militer tetap berpengaruh besar terhadap kendali pemerintahan. Kudeta militer pada Februari 2021 telah menghancurkan harapan akan reformasi demokrasi di Myanmar. Myanmar mendapat kecaman dari dunia internasional atas tindakan kekerasan yang dilakukan junta militer kepada masyarakat sipil. Di saat yang sama, aksi unjuk rasa anti kudeta menuntut agar militer mengembalikan kekuasaan kepada pemimpin Myanmar yang terpilih secara demokratis dan menuntut pembebasan pejuang demokrasi di Myanmar. Sementara itu, ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar, dianggap lamban dan tidak tegas terhadap junta militer Myanmar. ASEAN dinilai kurang berdaya untuk mengembalikan stabilitas keamanan dan tegaknya nilai-nilai HAM di Myanmar. Lambannya ASEAN itu dipengaruhi sejumlah hambatan internal maupun eksternal. Namun di tengah keterbatasannya sebagai organisasi regional, ASEAN tetap gigih melakukan langkah-langkah untuk memulihkan keadilan, mengatasi krisis kemanusiaan, dan krisis keamanan di Myanmar dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.

*Corresponding author: arisetyowati453@gmail.com

Cite this article as: Setyowati, A. and Umam, A.KH. (2026), Peran ASEAN dalam Mempromosikan Perdamaian dan Hak Asasi Manusia di Myanmar (2020-2023), Paramadina Journal of Diplomacy & Foreign Policy, 03 (01), 11-28.

<https://journal.paramadina.ac.id/index.php/diplomacyforeignpolicy>

1. Pendahuluan

Myanmar merupakan negara berkembang di Asia Tenggara, mendapat kemerdekaan dari Inggris tahun 1948, sejak merdeka hingga tahun 1962, Myanmar dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer, namun pada tahun 1962 terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh militer (kudeta

militer pertama) yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win, pemerintahan U Nu dianggap tidak mampu memimpin Myanmar. Pasca kudeta, pada tahun 1974, Ne Win sebagai pemimpin Myanmar membentuk konstitusi baru berdasarkan kebijakan luar negeri yang bersifat isolasionis dan program sosialis dan membentuk pemerintahan satu partai yaitu Partai Program Sosialis Burma yang berkuasa.

Pada 8 Agustus 1988, terjadi pemberontakan dan unjuk rasa oleh masyarakat sipil dan para biksu yang menuntut penghapusan kekuasaan militer dan menuntut demokrasi, selain itu ada hal mendasar yang memicu terjadinya demonstrasi berskala besar adalah karena memburuknya perekonomian Myanmar. Masyarakat Myanmar tidak tahan dengan kesulitan ekonomi, mereka menginginkan pemerintahan baru yang dapat membantu meningkatkan ekonomi dan kehidupan mereka dengan menempatkan negara di jalan demokrasi.

Pasca pemberontakan 1988, pemerintah melaksanakan pemilihan umum demokratis pada tahun 1990. Pemilu dimenangkan oleh partai oposisi yang sangat populer yaitu partai *National League of Democracy* (NLD) namun kemenangan tidak diakui oleh pihak militer, kekalahan militer memperlakukan pemerintah yang telah memerintah selama hampir 30 tahun (1962-1990), pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menahan para tokoh NLD, kondisi ekonomi Myanmar lesu, terputus dari eksternal baik regional dan internasional, Myanmar kehilangan identitas di seluruh dunia setelah terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh militer (kudeta militer kedua). Tahun 1993 pemerintah militer mencoba membentuk konstitusi baru namun gagal terlaksana karena ditentang oleh kubu politik menganggap bahwa proses penyusunan konstitusi tidak demokratis.

Demokratisasi di Myanmar mulai berproses kembali di tahun 2003, pemerintahan militer mempersiapkan untuk menyusun konstitusi baru yang tujuannya adalah menjamin dominasi militer. Penyusunan konstitusi baru selesai pada tahun 2008, dan akhirnya Myanmar memiliki UUD 2008 walaupun didalam prosesnya dianggap masih banyak manipulasi yang dilakukan oleh pihak militer. Konstitusi ini pada konsepnya digunakan untuk mempersiapkan pemilu-pemilu kedepan, Dimana didalam konstitusi ini disebutkan *konstitusional arrangement* dengan formula yaitu 25% anggota parlemen akan diangkat dari anggota aktif militer dan 75% diberikan ke kursi yang dipertaruhkan oleh partai politik

Tahun 2010 mulai dilakukan reformasi politik, Myanmar melaksanakan pemilu pertamanya sejak tahun 1990, yang secara resmi mengakhiri kediktatoran militer selama 22 tahun. Pemilu tahun 2010 dalam rangka menentukan pemimpin baru Myanmar, pemilu ini dimaksudkan untuk

memberi kesan bahwa militer akan menciptakan pemerintahan yang sah dan demokratis. Dengan dilaksanakannya pemilu secara demokratis, bukan berarti pihak militer dengan begitu saja mau menyerahkan kekuasaan yang dipegangnya, karena pihak militer sudah membentuk partai boneka yaitu *Union Solidarity & Development Party* (USDP). Pada pemilu tahun 2010 partai USDP bentukan militer meraih suara mayoritas dan Thein Sein menjadi kandidat Presiden dari partai USDP dan diangkat menjadi pemimpin baru Myanmar.

Atas desakan dunia internasional pemilihan umum demokratis kembali dilaksanakan di Myanmar pada tahun 2015, hasilnya adalah partai USDP bentukan militer kalah suara dan partai NLD menang hampir 80%.¹ Hasil pemilu ini menimbulkan permasalahan, berdasarkan aturan yang tertuang dalam konstitusi Myanmar yang dibentuk pada tahun 2008, di dalam konstitusi disebutkan bahwa presiden Myanmar tidak boleh ada kaitan keluarga dengan WNA baik suami atau anak yang memiliki kewarganegaraan asing. Dengan adanya ketentuan ini, maka Aung Suu Kyi tidak bisa menjadi Presiden karena bertentangan dengan konstitusi. Akhirnya Aung San Suu Kyi membentuk sendiri jabatan sebagai penasehat negara (*State Counselor*) yang berada di atas jabatan presiden, meskipun konstitusi tidak mengatur masalah ini. Dalam masa 2015-2020 Jenderal Ming Aun Wen dijadikan Presiden menggantikan posisi Aung San Suu Kyi.

Pemilihan umum dilaksanakan lima tahun kemudian pada 8 November 2020, transisi menuju demokrasi di Myanmar semakin mendapatkan momentumnya, NLD memenangkan pemilu dengan suara yang cukup signifikan mengalahkan partai oposisi utama yaitu USDP. Kemenangan memicu ketegangan antara pemerintah sipil dan junta militer. Junta militer (Tatmadaw) menuduh terjadi kecurangan dan manipulasi dan meminta pemilu diulang kembali. Dampak dari ketegangan politik ini adalah terjadinya pengambil alihan kekuasaan oleh junta militer pada 1 Februari 2021, sejumlah tokoh NLD ditangkap dan ditahan oleh militer dan militer mengumumkan keadaan darurat selama 1 tahun kedepan dalam rangka menjaga stabilitas negara. Kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan kepada pemimpin militer untuk melaksanakan tugas sebagai presiden Myanmar. Militer berjanji akan melaksanakan

pemilu demokratis setelah keadaan stabil, namun dari tahun 2021 sampai dengan saat ini (tahun 2024) belum terlaksana pemilihan umum di Myanmar.

Disinilah latar belakang permasalahan yang akan penulis angkat, mengapa proses demokratisasi di Myanmar tidak dapat berjalan damai, apa yang salah dengan transisi demokrasi di Myanmar. Rumusan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peran organisasi regional ASEAN dalam mendorong demokratisasi di Myanmar?
2. ASEAN dalam mengatasi krisis kemanusiaan dan instabilitas keamanan di Myanmar tahun 2020-2023?

Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dalam setting waktu tahun 2020-2023 dengan menganalisis, menginvestigasi dan memahami fenomena yang terjadi, dimana peneliti mencari kejelasan data secara komprehensif mengenai isu Myanmar, pendekatan tersebut dimaksudkan untuk menguji relevansi teori terhadap suatu peristiwa di bidang sosial dan politik karena kompleksitasnya. Teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh diantaranya melalui *in-depth interview* yaitu dilakukan diskusi dan komunikasi dengan para narasumber meliputi tokoh politik, dosen, pejabat publik, konsulat jenderal, diplomat, aktifis, perwakilan organisasi internasional, berikut antara lain: (1) Bapak Dr. Priyambudi Sulistiyanto merupakan dosen di Flinders University, Australia; (2) Bapak R. Sigit Witjaksono merupakan Konsul Jenderal RI untuk Kuching dan (3) Ibu Yuyun Wahyuningrum merupakan seorang diplomat, aktifis HAM dan wakil Indonesia untuk AICHR. *Interview* dilakukan untuk memperoleh pendapat dan pandangan terkait sejarah Myanmar, kudeta militer dan pelanggaran HAM di Myanmar.

Selanjutnya untuk data sekunder diperoleh dari studi dokumen berupa laporan, peraturan, media domestik dan internasional, buku-buku, dan jurnal. Data yang dihasilkan dari wawancara dengan informan selanjutnya digunakan untuk mengonfirmasi data yang diperoleh dari studi dokumen. Dari data-data yang diperoleh selanjutnya dilakukan analisis untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang

dinamis bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

Neo-Liberalisme, Regionalisme, Kepentingan Nasional & Teori Organisasi Internasional: Sebuah Kerangka Teoretik

Perspektif paradigma hubungan internasional pada penelitian ini mendasarkan pada teori neoliberalisme yaitu sebuah pendekatan yang menekankan pentingnya lembaga-lembaga internasional, aturan-aturan, dan kerjasama antar negara dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas dan perdamaian global. Neoliberalisme berargumen bahwa norma-norma dan rezim-rezim internasional dapat mempengaruhi perilaku negara dengan menciptakan harapan-harapan bersama dan membentuk perilaku yang diinginkan. Rezim internasional adalah serangkaian aturan, norma, dan prosedur yang disepakati bersama oleh negara-negara untuk mengatur isu-isu tertentu.

Neoliberalism pada prinsipnya adalah pendekatan untuk mempelajari organisasi internasional dan pola kerjasama internasional, aliran pemikiran yang berpendapat bahwa kerjasama internasional antar negara dapat dilakukan secara berkelanjutan dalam mengatasi konflik. Robert O Keohane dan Joseph Nye dianggap sebagai pendiri Neoliberalism, inti dari argumennya adalah bahwa negara adalah aktor rasional dan tindakan negara seringkali dapat diprediksi, menekankan pentingnya lembaga dan pembentukan pengaturan yang dilembagakan berisi aturan dan prinsip-prinsip yang mempromosikan kerja sama (Keohane, 1984).

Neoliberalisme percaya bahwa kerjasama antar negara adalah mungkin dan dapat difasilitasi melalui lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan antar negara. Negara-negara dianggap sebagai aktor rasional yang mengejar kepentingan mereka, tetapi aktor non-negara seperti perusahaan multinasional, organisasi non-pemerintah, dan kelompok masyarakat sipil juga memainkan peran penting dalam hubungan internasional. Neoliberalisme menekankan bahwa interdependensi ekonomi antar negara mendorong perdamaian dan stabilitas.

Arthur Stein dan Robert Axelrod mengemukakan bahwasanya pendapat terkait

anarki di dalam sistem internasional memanglah suatu yang benar dan tak terhindarkan. Mereka juga mengakui bahwa anarki pada akhirnya menjadi sebuah rintangan bagi negara untuk membangun kerja sama. Hal ini kemudian membuat kehadiran institusi internasional diperlukan agar bisa menjadi wadah bagi negara dalam membangun hubungan kerjasama di tengah situasi sistem internasional yang anarki. Para neoliberalis juga percaya bahwasanya institusi internasional mengemban tugas penting sebagai mediator dalam menjembatani kepentingan-kepentingan setiap aktor di dalam sistem internasional (Dugis 2018).

Teori lainnya dari Samuel P. Huntington adalah ilmuwan politik dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul "*The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*" (1991), menjelaskan perkembangan politik global dan revolusi demokrasi global pada akhir abad ke 20 (antara 1974 dan 1990), Huntington menganalisis sebab dan hakikat revolusi demokrasi yang bersifat global. Demokrasi memiliki konsekuensi positif bagi kebebasan individu, stabilitas domestic dan perdamaian internasional. Huntington berpendapat bahwa proses demokrasi tidak berjalan sederhana tetapi memerlukan berbagai tahapan yang perlu dijejaki sebelum sampai pada yang dicita-citakan. Huntington menjelaskan bagaimana transisi demokrasi dapat berlangsung dalam 4 skenario besar yaitu meliputi:

1. Transformasi, dimana rezim yang berkuasa memimpin dalam mewujudkan demokrasi;
2. Replacement, dimana kelompok oposisi memimpin dalam mewujudkan demokrasi;
3. Transplacement, demokrasi terjadi dari aksi bersama rezim berkuasa dengan oposisi; dan
4. Intervensi, yakni adanya kekuatan pihak luar dalam menjatuhkan rezim yang berkuasa.

Demokratisasi menurut Huntington adalah transisi politik suatu negara yang datang melalui berbagai bentuk, termasuk transisi rezim otoriter ke demokrasi parsial, demokrasi parsial ke demokrasi penuh atau transisi dari otoriter langsung ke demokrasi penuh. Demokratisasi menurut Huntington dapat dipecah menjadi tiga gelombang besar sepanjang Sejarah, dan gelombang ketiga yang paling relevan di negara berkembang yaitu dengan rezim otoriter, bahwa penyebab demokratisasi gelombang ketiga dikaitkan dengan hilangnya legitimasi rezim otoriter dan demokratisasi didorong oleh

tekanan internasional yang dipaksakan oleh negara-negara demokratis baik melalui ketergantungan ekonomi, bantuan asing atau melalui organisasi non pemerintah.

Teori lain dari Jean Grugel seorang ilmuwan, dalam tulisan bukunya yang berjudul "*Democratization A Critical Introduction*", dijelaskan tentang hubungan antara demokrasi dan demokratisasi bahwa demokratisasi adalah transformasi sistem politik dari non demokrasi menuju pemerintahan yang akuntabel dan representative, demokrasi adalah tatanan politik bukan ekonomi, namun hak ekonomi mempengaruhi hak politik. Demokrasi tidak dapat terjadi tanpa reformasi sosial-ekonomi, budaya-sosial dan transformasi dari hubungan gender. Serangkaian tekanan dan peristiwa global dapat membuka peluang politik bagi demokratisasi pada akhir abad kedua puluh, menurut pandangan Grugel terlepas dari berbagai tekanan dan peristiwa global untuk demokratisasi, konsolidasi demokratisasi ditentukan secara nasional. Dimana keberhasilan demokratisasi dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama adalah munculnya masyarakat sipil yang kuat, solid dan bersemangat yang bekerja secara konsisten untuk mendemokratisasikan politik dan meminta pertanggungjawaban negara. Yang kedua adalah keberadaan negara yang mampu dan fleksibel.

Teori peran dan organisasi internasional menurut Clive Archer dalam bukunya yang berjudul *International Organization*, dalam tulisannya, "*three major roles can be identified: those of instrument, arena and actor*".ⁱⁱ Menurut Archer, terdapat 3 (tiga) peran organisasi internasional secara umum, yaitu: (1) organisasi internasional sebagai instrument, dimana organisasi internasional difungsikan sebagai instrument dalam melakukan diplomasi dalam rangka mencapai kepentingan suatu negara; (2) organisasi internasional sebagai arena, dimana organisasi berfungsi sebagai forum, tempat dimana didalamnya para anggota dapat melakukan negosiasi, diplomasi, merumuskan kesepakatan, merumuskan perjanjian-perjanjian internasional dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan negara anggotanya; (3) organisasi internasional sebagai actor, dalam hal ini organisasi internasional merupakan actor independent yang dianggap mampu bertindak secara independent tanpa dipengaruhi oleh kekuatan manapun.

Akar Sejarah Konflik Myanmar

Myanmar adalah sebuah negara kecil di kawasan Asia Tenggara dengan jumlah penduduk kurang lebih 50 juta orang. Sejak memperoleh kemerdekaannya pada 4 Januari 1948, Myanmar tidak pernah sepi dari pergolakan politik dan kudeta militer yang silih berganti. Ketika Myanmar merdeka pada tahun 1948 (waktu itu bernama Burma), di bawah pemerintahan sipil U Nu, mencoba menjalankan pemerintahan yang demokratis dengan menerapkan sistem parlementer. Sebagaimana halnya negara yang baru merdeka, pemerintahan U Nu juga dihadapkan pada keadaan sosial-politik yang rumit. Dengan strategi pembangunan negara yang makmur, U Nu berusaha keras menyelesaikan berbagai persoalan kompleks yang muncul, baik yang berkenaan dengan aspek perekonomian, pembelotan maupun pemberontakan.ⁱⁱⁱ Keterlibatan militer dimulai ketika Jenderal Ne Win ditugaskan untuk mengendalikannya ketertiban dan mempersiapkan pemilu tahun 1960. Pemerintahan militer saat itu berhasil memulihkan keadaan dalam negeri sampai terselenggaranya pemilu tahun 1960 yang dimenangkan oleh U Nu dan partainya, Union Party. Pihak militer kemudian mengultimatum pemerintah sipil dengan memberikan waktu selama 2 tahun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi Myanmar. Karena pemerintah sipil tidak dapat menata kembali kondisi dalam negeri Myanmar yang semakin diperparah dengan kegagalan U Nu dalam menata sistem perekonomian dan administrasi Myanmar, maka timbul ketidakpuasan di kalangan pro-militer. Akhirnya pada 2 Maret 1962, militer melakukan kudeta di bawah pimpinan Jenderal Ne Win.^{iv}

Keberhasilan kudeta atas pemerintahan U Nu pada tahun 1962 bisa dikatakan sebagai awal keruntuhan demokrasi di Myanmar. Selama masa pemerintahannya (1962-1988) Ne Win hanya mengakui satu partai politik, yaitu *Burmese Socialist Program Party* (BSPP) partai tunggal yang dibentuk untuk mendukung program sosialis Burma dengan mayoritas anggota berasal dari golongan militer, dengan sistem pemerintahan kediktatoran militer yang represif dengan kebijakan ekonomi sosialis dan mengisolasi Burma dari internasional, Ne Win mengubah Myanmar menjadi negara miskin dan tertinggal. Korupsi dan tata kelola pemerintah yang buruk juga telah mendorong sebagian

aktivitas ekonomi ke pasar gelap, karena keadaan Myanmar yang semakin merosot, pada tahun 1988 terjadilah pemberontakan dan demonstrasi besar yang dikenal dengan pemberontakan 8888 yang dipelopori oleh aktivis mahasiswa, di dukung oleh rakyat dan para biksu Budha, namun ditindas dengan kekerasan militer oleh Jenderal Saw Maung.^v Pemberontakan tersebut mendorong Ne Win untuk mundur dan pada akhirnya Ne Win mengundurkan diri kemudian militer mengumumkan keadaan darurat dan Jenderal Saw Maung mengambil alih kekuasaan pemerintahan. Sebagaimana pendahulunya, pemerintahan militer Jenderal Saw Maung juga memimpin dengan sistem otoriter.

Setelah pemberontakan tahun 1988 dan atas desakan masyarakat, pemerintah berjanji akan segera melaksanakan pemilihan umum demokratis hingga akhirnya tahun 1990 pemilu demokratis pertama dilaksanakan. Pemilu dimenangkan oleh partai oposisi yang sangat populer di mata rakyat yaitu partai *National League of Democracy* (NLD) namun kemenangan tidak diakui oleh pihak militer, kekalahan militer memperlakukan pemerintah yang telah memerintah selama hampir 30 tahun (1962-1990), pihak militer mengambil alih kekuasaan dan menahan para tokoh NLD, kondisi ekonomi Myanmar lesu, terputus dari eksternal baik regional dan internasional, Myanmar kehilangan identitas di seluruh dunia setelah terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh militer (kudeta militer kedua). Tahun 1993 pemerintah militer mencoba membentuk konstitusi baru namun gagal terlaksana karena ditentang oleh kubu politik menganggap bahwa proses penyusunan konstitusi tidak demokratis.

Demokratisasi di Myanmar mulai berproses kembali di tahun 2003, proses menuju demokrasi yang mulai disuarakan, membuat pemerintahan militer kembali mempersiapkan untuk menyusun konstitusi baru yang tujuannya adalah menjamin dominasi militer. Penyusunan konstitusi baru selesai pada tahun 2008, dan akhirnya Myanmar memiliki UUD 2008 walaupun didalam prosesnya dianggap masih banyak manipulasi yang dilakukan oleh pihak militer dan pihak oposisi (partai NLD) juga memboikot konstitusi tersebut karena penyusunannya dianggap tidak demokratis. Konstitusi ini pada konsepnya digunakan untuk mempersiapkan pemilu-pemilu kedepan, Dimana didalam konstitusi ini disebutkan *konstitusional arrangement*

dengan formula yaitu 25% anggota parlemen akan diangkat dari anggota aktif militer dan 75% diberikan ke kursi yang dipertaruhkan oleh partai politik

Pada tahun 2010 mulai dilakukan reformasi politik, Myanmar melaksanakan pemilu pertamanya sejak tahun 1990, yang secara resmi mengakhiri kediktatoran militer selama 22 tahun. Pemilu tahun 2010 dalam rangka menentukan pemimpin baru Myanmar, pemilu ini dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa militer akan menciptakan pemerintahan yang sah dan demokratis, pada kenyataannya, pemilu dirancang untuk mempertahankan kekuasaan militer di bawah topeng demokrasi. Dengan dilaksanakannya pemilu secara demokratis, bukan berarti pihak militer dengan begitu saja mau menyerahkan kekuasaan yang dipegangnya, karena pihak militer sudah membentuk partai boneka yaitu *Union Solidarity & Development Party* (USDP), partai ini menjadi instrument yang digunakan oleh militer untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya di Tengah demokratisasi di Myanmar. Pada pemilu tahun 2010 partai USDP bentukan militer meraih suara mayoritas dan Thein Sein menjadi kandidat Presiden dari partai USDP dan diangkat menjadi pemimpin baru Myanmar. Banyak dugaan bahwa hasil pemilu tersebut dimanipulasi oleh pihak militer, namun diadakannya pemilu dan terpilihnya pemimpin secara demokratis menandai berakhirnya pemerintah militer di negara Myanmar, walaupun demikian pengaruh militer di negara ini masih cukup besar salah satunya melalui partai USDP dan hak-hak Istimewa yang didapatkan militer dalam pemerintahan, seperti mendapatkan jatah kursi khusus di parlemen tanpa melewati pemilu dan juga berbagai jatah kursi kekuasaan yang berkaitan dengan bidang pertahanan dan keamanan seperti menteri pertahanan, menteri perbatasan dan menteri dalam negeri.

Atas desakan dari dunia internasional pemilihan umum demokratis kembali dilaksanakan di Myanmar pada tahun 2015, dimana partisipasi publik meningkat pesat terutama di kalangan Perempuan. Hasilnya adalah partai USDP bentukan militer kalah suara dan partai NLD menang hampir 80%.^{vi} Hasil pemilu ini menimbulkan permasalahan, berdasarkan aturan yang tertuang dalam konstitusi Myanmar yang dibentuk pada tahun 2008, di dalam konstitusi disebutkan bahwa presiden Myanmar tidak

boleh ada kaitan keluarga dengan WNA baik suami atau anak yang memiliki kewarganegaraan asing. Dengan adanya ketentuan ini, maka Aung Suu Kyi tidak bisa menjadi Presiden karena bertentangan dengan konstitusi. Akhirnya Aung San Suu Kyi membentuk sendiri jabatan sebagai penasehat negara (*State Counselor*) yang berada di atas jabatan presiden, padahal konstitusi tidak mengatur tentang masalah ini. Dalam masa 2015-2020 Jenderal Ming Aun Wen dijadikan Presiden menggantikan posisi Aung San Suu Kyi.

Pemilihan umum demokratis kembali dilaksanakan lima tahun kemudian tepatnya pada 8 November 2020, transisi menuju demokrasi di Myanmar semakin mendapatkan momentumnya, dimana NLD kembali memenangkan pemilu dengan suara yang cukup signifikan. Partai NLD dibawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pengusung demokrasi mengalahkan partai oposisi utama yaitu USDP. Namun kemenangan NLD atas USDP tidak lantas berjalan damai, kemenangan tersebut justru memicu ketegangan antara pemerintah sipil dan junta militer. Junta militer (Tatmadaw) menuduh terjadi kecurangan dan manipulasi atas kemenangan tersebut dan meminta pemilu diulang kembali. Dampak dari ketegangan politik ini adalah terjadinya pengambil alihan kekuasaan (kudeta militer) dari pemerintahan *de facto* hasil pemilu demokrasi oleh junta militer pada 1 Februari 2021, akibatnya sejumlah tokoh NLD ditangkap dan ditahan oleh militer dan militer mengumumkan keadaan darurat selama 1 tahun kedepan dalam rangka menjaga stabilitas negara. Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan pemerintahan kemudian diserahkan kepada pemimpin militer dengan kekuasaan penuh diberikan kepada Jenderal Min Aung Hlaing (Panglima Tertinggi Tatmadaw) dan Tatmadaw juga mengangkat Jenderal U Mynt Swe untuk melaksanakan tugas sebagai penjabat presiden Myanmar. Militer berjanji akan melaksanakan pemilu demokratis setelah keadaan stabil, namun dari tahun 2021 sampai dengan saat ini (tahun 2024) belum terlaksana pemilihan umum di Myanmar.

ASEAN sebagai organisasi regional yang menaungi Myanmar dihadapkan pada tantangan untuk dapat mengatasi persoalan negara anggotanya, yaitu krisis keamanan dan kemanusiaan di Myanmar namun tetap berpedoman pada nilai-nilai ASEAN. Indonesia, Malaysia,

Singapura, dan Thailand di Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) mendesak Myanmar untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN. Dimana Piagam ASEAN antara lain menyebut “kepatuhan terhadap aturan hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip dmeokrasi, perlindungan HAM, dan menghormati kebebasan mendasar. Myanmar sebagai anggota ASEAN harus berkomitmen nilai-nilai yang dinyatakan dalam Piagam ASEAN 2008 untuk mematuhi prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan HAM dan kebebasan fundamental. Karena ketidakmampuan ASEAN untuk menghentikan kekerasan di Myanmar kemungkinan akan memperburuk hubungannya dengan Barat, jika hubungan dengan Barat memburuk maka kapasitas ASEAN untuk meredam agresivitas Tiongkok juga akan melemah

Dampak Konflik terhadap Aspek Sosial-Politik & Keamanan Myanmar

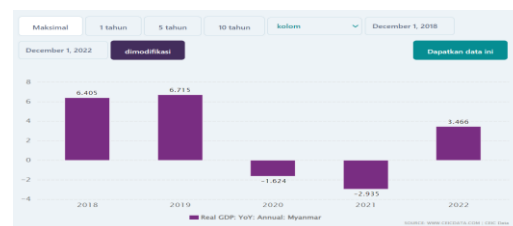
Dampak konflik Myanmar terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara, bahwa junta militer telah menghancurkan supremasi hukum. Pasukan keamanan bertanggung jawab atas kematian pengunjuk rasa, melakukan tindakan kriminal yang kejam, menyerang warga sipil dan membuat masyarakat di seluruh Myanmar tidak aman. Puluhan ribu orang meninggalkan Myanmar, mencari perlindungan ke negara tetangga, diantaranya Thailand, India, dan China. Ledakan aktivitas kriminal transnasional telah melanda wilayah tersebut, dimana Thailand melaporkan peningkatan signifikan dalam kejahatan terkait narkoba, dan otoritas Tiongkok telah menangkap sejumlah orang yang menyeberang secara ilegal melalui perbatasan Myanmar-Tiongkok. Konflik Myanmar yang terus berlanjut akan mengguncang stabilitas di ASEAN dan menimbulkan ancaman utama terhadap penegakan hukum Asia Tenggara.

Selanjutnya, kudeta militer tidak hanya menjadi kemunduran proses demokrasi namun berdampak besar pada perekonomian Myanmar, mendorong hampir separuh penduduknya ke dalam kemiskinan dan menghapus kemajuan yang telah dicapai selama bertahun-tahun. Perubahan peta investasi dimungkinkan jika rezim militer kembali mencengkeram, investor asing

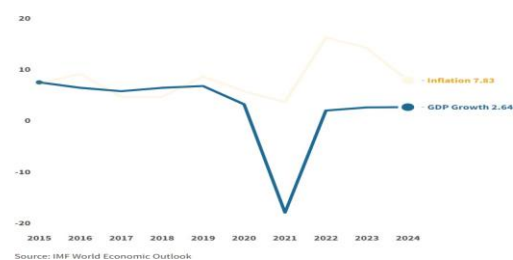
dari barat yang datang selama satu decade terakhir bersiap menarik investasinya, rendahnya lapangan kerja, tingginya harga, kontrol mata uang, pembekuan aset, sanksi internasional, embargo ekonomi akan menekan ekonomi Myanmar, dan meningkatnya konflik menggambarkan gambaran suram bagi pemulihan ekonomi Myanmar. Prospek pertumbuhan Myanmar sangat bergantung pada proyek infrastruktur utama dan investasi asing langsung. Myanmar masuk dalam daftar hitam oleh gugus tugas aksi keuangan, yang mana hal ini merusak reputasi Myanmar dan menghalangi investasi. Sanksi terhadap bank milik negara menghentikan hubungan negara-negara lain dengan bank-bank Myanmar. Pendapatan pajak turun dan ekspor gas menurun akibat kurangnya produksi dan gangguan akibat konflik di wilayah perbatasan. Memburuknya ekonomi Myanmar juga terlihat diberbagai indikator sosial yaitu belanja public untuk kesehatan dan pendidikan.^{vii}

Pertumbuhan PDB Myanmar mengalami penurunan pada tahun 2020-2023. Pergolakan politik sejak perebutan kekuasaan telah berdampak banyak pada kehidupan masyarakat, anak-anak tidak bisa sekolah, pendidikan, kesehatan dan mata pencaharian semuanya mengalami kemunduran. Kudeta Myanmar menyisakan berbagai dampak sosial termasuk pelanggaran HAM.

Pertumbuhan PDB Riil Myanmar
Tahun 2018-2022



Tingkat PDB dan Inflasi Myanmar
Tahun 2015-2024

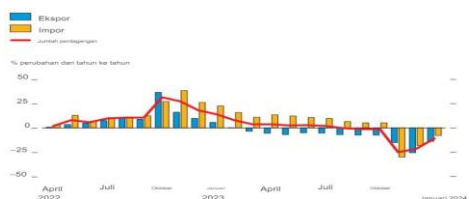


Pertumbuhan Produk Domestik Bruto, ketid-akstabilan dan konflik menghambat pertumbuhan



Sumber: Bank Sentral Myanmar

Konflik perbatasan merugikan perdagangan



Sumber: Kementerian Perdagangan Myanmar

Kematian yang dilaporkan akibat konflik dan demonstrasi, 1 Feb 2021-21 Jan 2022



Sumber: Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED)

Respon Negara-Negara Asia Tenggara & Dunia Internasional terhadap Konflik Myanmar

Negara-negara di Asia Tenggara telah bereaksi terhadap kudeta di Myanmar dengan berbagai cara yang mencerminkan kepentingan yang berbeda. Berikut respon dari negara anggota ASEAN terhadap kudeta militer Myanmar 1 Februari 2021:

No	Negara	Respon
1.	Brunei Darussalam	Posisi Brunei saat kudeta terjadi adalah sebagai ketua ASEAN, tetapi Brunei menahan diri untuk mengomentari atas situasi yang terjadi di Myanmar, Brunei bereaksi dengan membuat pernyataan yang mendorong "dialog, rekonsiliasi dan kembalinya keadaan normal sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat Myanmar", dan mengingatkan "tujuan dan prinsip-prinsip yang diabdikan dalam Piagam ASEAN, termasuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum dan pemerintahan yang baik, penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan mendasar.viii Dan Brunei lambat dalam memfasilitasi pertemuan dan pemilihan utusan khusus, mengabaikan seruan partisipasi dari warga sipil CRPH dan NUG, dan pada bulan April Brunei memfasilitasi pertemuan dengan junta tanpa memberitahu anggota ASEAN lainnya.
2.	Kamboja	Kamboja secara terbuka menyambut Min Aung Hlaing sebagai pemimpin Burma, tetapi juga menyesali kekerasan yang dilakukan junta terhadap warga negara, dan berjanji memberikan dukungan kemanusiaan, namun Kamboja juga berkomitmen untuk tidak melakukan campur tangan.
3.	Indonesia	Melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan keprihatinan atas perkembangan politik di Myanmar, meminta Myanmar untuk mematuhi supremasi hukum, penggunaan prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan terkait hasil pemilu kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia dan mendesak semua pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.ix
4.	Laos	Seperti Kamboja, tidak banyak memberikan statement namun berjanji memberikan dukungan kemanusiaan.
5.	Malaysia	Malaysia telah menjadi kritikus yang paling vokal, menyerukan pembebasan segera Aung San Suu Kyi dan para pemimpin politik lainnya, pemulihan status quo di bawah pemerintahan NLD, dan pasukan keamanan untuk menahan kekerasan junta. Memberikan statement bahwa jika situasi memburuk, ASEAN harus menganggapnya sebagai ancaman serius terhadap perdamaian dan stabilitas regional.
6.	Filipina	Filipina dengan tegas mengindikasikan bahwa tidak akan ikut campur dalam urusan Myanmar, namun mengatakan bahwa hal ini bukan berarti Filipina mendukung tindakan junta.
7.	Singapura	Mengutuk kekerasan para jenderal terhadap pengunjuk rasa anti kudeta. Singapura mengkritik junta, menyebut bahwa kekerasan yang dilakukan junta terhadap warga negara sebagai "puncak rasa malu nasional" dan mengatakan bahwa ketegangan yang terus berlanjut di Myanmar mengancam akan merusak stabilitas regional. Namun, Singapura menyatakan keinginannya untuk terlibat dengan junta, bukan mengisolasi junta.
8.	Thailand	Thailand berusaha untuk tidak ikut campur dalam "urusan dalam negeri" Myanmar, namun mengisyaratkan bahwa mereka melakukan diplomasi diam-diam. Pada saat yang sama, Thailand perlu mengatasi berbagai insiden junta serta migrasi yang terus berlanjut yang disebabkan oleh krisis yang sedang berlangsung.
9.	Vietnam	Vietnam telah menyatakan keprihatinannya atas kekerasan dan kematian, dan menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk melakukan dialog dan demokrasi di Myanmar.

Sumber: Forum Asia BN 2021/2044: 26 Oktober 2021

Respon Internasional dan Organisasi Internasional

No	Negara	Respon
1.	Amerika Serikat	Presiden Joe Biden menyatakan bahwa militer Myanmar harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut, membebaskan para aktivis dan pendukung serta pejabat yang telah mereka tangkap, mencabut pembatasan telekomunikasi, dan menahan diri dari kekerasan. Dalam sambutannya tentang kebijakan luar negerinya, Biden mengatakan pemerintahannya akan bekerja dengan mitra kami untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum dan memberikan konsekuensi pada mereka yang bertanggung jawab.
2.	Asian for Free Election (ANFREL)	mendesak Tatmadaw untuk membebaskan para tahanan dan agar segala kecurangan pemilu diselesaikan melalui peradilan pemilu. Desakan ini merupakan kepedulian berbagai organisasi masyarakat sipil internasional. Melalui pengorganisasian ANFREL, setidaknya ada 46 organisasi masyarakat sipil lintas negara yang bergabung per 3 Februari 2021.
3.	International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance)	menyerukan agar militer Myanmar menghormati sepenuhnya hasil pemilu nasional baru-baru ini, membebaskan semua pemimpin politik dan masyarakat sipil yang ditahan, menahan diri dari melakukan kekerasan, dan mengizinkan negara untuk melembagakan reformasi demokrasi yang nyata. Melalui pernyataan "Defend Democracy in Myanmar" organisasi antarpemerintahan yang bermarkas di Swedia ini menggali dukungan bersama organisasi-organisasi demokrasi lintas negara. Total ada 34 organisasi dan 136 perseorangan bergabung, Perludem dari Indonesia salah satunya.

Langkah Progresif Pendekatan ASEAN terhadap Myanmar

ASEAN memiliki tanggung jawab besar untuk mengupayakan pendekatan terhadap pemerintah Myanmar guna memulihkan demokrasi. Pendekatan dan langkah-langkah ASEAN dalam mengatasi isu Myanmar antara lain:

Tanggapan ASEAN pasca kudeta militer 1 Februari 2021

No	Waktu	Tanggapan
1.	2 Maret 2021	Para pemimpin ASEAN mengadakan Pertemuan Informal Tingkat Menteri ASEAN (IAMM), dan menyatakan dukungan dan keprihatinannya, menyerukan semua pihak untuk menghindari kekerasan dan terlibat dalam dialog.
2.	19 Maret 2021	Indonesia menyerukan agar anggota ASEAN bertemu sesegera mungkin untuk membahas Myanmar, sebuah seruan yang didukung oleh Malaysia dan Singapura.
3.	22 April 2021	Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) menulis surat terbuka kepada para pemimpin ASEAN, menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam KTT ASEAN.

4.	24 April 2021	Anggota ASEAN mengadakan forum tingkat tinggi di Jakarta dan Jenderal Min Aung Hlaing hadir pada pertemuan tersebut. Dimana dalam pertemuan tingkat tinggi tersebut menghasilkan konsensus lima poin yang menyerukan penghentian kekerasan; dialog konstruktif; utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi; pemberian bantuan kemanusiaan dan utusan khusus serta delegasi untuk mengunjungi Myanmar agar bertemu semua pihak terkait.
4.	26 April 2021	Junta membatalkan komitmen yang telah disepakati pada pertemuan sebelumnya yang tertuang dalam konsensus lima poin. Junta mengatakan bahwa lima poin ASEAN yang disebut 'saran' oleh junta hanya akan dipertimbangkan setelah stabilitas di Myanmar dipulihkan.
5.	27 April 2021	NUG mengatakan bahwa konsensus tidak mencerminkan situasi di Myanmar, dan menolak poin pertama dari konsensus yaitu "semua pihak harus menahan diri", karena hanya militer yang melakukan kekerasan.
6.	11 Mei 2021	Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa junta tidak menunjukkan tanda-tanda mematuhi konsensus, dan meminta ASEAN untuk segera bereaksi dan mengintensifkan tindakan.
7.	23 Mei 2021	Berdasarkan laporan dari salah satu wawancara televisi Tiongkok, Min Aung Hlaing menyampaikan bahwa Min Aung Hlaing tidak melihat bagaimana konsensus dapat dilaksanakan. Sehingga salah satu sumber berpendapat bahwa pemimpin junta belum siap melaksanakan konsensus tersebut.
8.	4 Juni 2021	Perwakilan Brunei bertemu dengan Min Aung Hlaing dan ketua komisi pemilihan junta Thein Soe, dimana pertemuan tersebut dilaporkan membahas kerja sama dengan ASEAN dan prosedur untuk pemilu mendatang. Sedangkan dalam pertemuan tersebut, Brunei sebelumnya tidak memberi tahu dan tidak memberikan laporan setelah pertemuan tersebut kepada ASEAN. Catatan: Pernyataan ASEAN pada hari berikutnya mengatakan bahwa kunjungan perwakilan Brunei adalah dalam rangka untuk memajukan 'solusi damai demi kepentingan rakyat (Burma/Myanmar)' dengan menerapkan konsensus. Serta menyebut Min Aung Hlaing sebagai "ketua" Dewan Administrasi Negara junta untuk pertama kalinya. Namun sejak tanggal 8 Juni 2021 pernyataan tersebut tidak lagi ditemukan di situs web ASEAN.
9.	1 Agustus 2021	Min Aung Hlaing mengatakan junta siap bekerja sama dengan ASEAN dan melakukan dialog dengan utusan khusus masa depan.
10.	4 Agustus 2021	ASEAN mengukuhkan Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Erywan Yusof, sebagai utusan khusus untuk Myanmar. Sekretaris PBB segera menggambarkan penunjukan tersebut sebagai langkah penting untuk mengakhiri krisis di Myanmar. Namun kelompok aktivis Justice For Myanmar mengungkapkan bahwa penunjukan yang telah lama tertunda itu dikompromikan oleh hubungan bisnis antara Perusahaan minyak milik negara Brunei dan Perusahaan Myanmar yang berada di bawah kendali junta, dimana Brunei mempunyai saham di tiga ladang minyak dan gas di Myanmar, dan bermitra dengan militer Myanmar.
11.	18 Agustus 2021	ASEAN mengadakan konferensi virtual tentang bantuan kemanusiaan untuk Myanmar dan menjanjikan memberikan bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana melalui AHA Centre.

12.	31 Agustus 2021	Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, Yusof menyerukan gencatan senjata selama empat bulan untuk memfasilitasi distribusi bantuan Covid-19 dan melaporkan bahwa menteri junta Wunna Maung Lwin telah menerima gencatan senjata tersebut. (sumber: Kyodo News, 5 Sept 2021) Namun NUG menanggapi dengan mengkritik Yusof dengan mengatakan bahwa sebelum menyerukan gencatan senjata untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan, utusan khusus seharusnya mendapatkan jaminan dari junta bahwa junta akan menghentikan penangkapan warga sipil dan mengizinkan Yusof untuk bertemu Penasihat Negara Aung San Suu Kyi. (sumber: Irrawady, 6 Sept 2021)
13.	6 September 2021	Junta mengatakan bahwa meskipun mereka mengizinkan kunjungan ASEAN dan tidak akan memblokir bantuan kemanusiaan, junta tidak menerima seruan Yusof untuk melakukan gencatan senjata. (sumber: Irrawady, 7 Sept 2021)
14.	15 Oktober 2021	Ketua ASEAN, Brunei mengumumkan bahwa ASEAN tidak akan mengundang perwakilan junta, namun hanya "perwakilan non-politik," mengingat kurangnya kemajuan dalam penerapan konsensus, dan ASEAN juga tidak mengundang perwakilan NUG.

Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Tahun 2021 - 2023

1. KTT ASEAN pada tanggal 24 April 2021, di Sekretariat ASEAN di Jakarta-Indonesia.
Pertemuan para pemimpin ASEAN diselenggarakan pada tanggal 24 April 2021 di Sekretariat ASEAN di Jakarta, yang di ketuai oleh YM Sultan Haji Hassanal Bolkiah (Brunei Darussalam), dalam pertemuan yang membahas situasi di Myanmar, para pemimpin mencapai kesepakatan atas Konsensus Lima Poin (5PC), isinya adalah sebagai berikut:
 1. Pertama, kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
 2. Kedua, dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus dimulai untuk mencari Solusi damai demi kepentingan rakyat.
 3. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
 4. Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
 5. Kelima, utusan dan delegasi khusus akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.
2. KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 pada tanggal 26 Oktober 2021, melalui konferensi video.

Terselenggaranya KTT ASEAN di bawah kepemimpinan Brunei Darussalam YM. Sultan Haji Hassanal Bolkiah. KTT dihadiri para pemimpin ASEAN, kecuali Myanmar. ASEAN memutuskan tak mengundang Min Aung Hlaing karena Myanmar tidak menunjukkan komitmen menjalankan 5PC yang disepakati dalam KTT sebelumnya di Jakarta.^x Keputusan Emergency AMM, Myanmar telah diundang pada level non-politik, namun sampai pelaksanaan KTT Myanmar tidak menyampaikan wakil pada level non-politik karena Junta militer menolak mengirimkan perwakilan non politik.

Poin penting KTT ASEAN ke-38 dan ke-39 mengenai perkembangan Myanmar:

ASEAN menyatakan keprihatinan atas situasi di negara tersebut, termasuk laporan mengenai korban jiwa dan kekerasan. ASEAN juga mendengar seruan pembebasan tahanan politik termasuk orang asing. ASEAN menyerukan kepada Myanmar untuk memenuhi komitmennya terhadap Konsensus Lima Poin pada pertemuan pemimpin ASEAN tanggal 24 April 2021, ASEAN menegaskan kembali bahwa Myanmar tetap menjadi anggota keluarga ASEAN dan menyadari bahwa Myanmar memerlukan waktu dan ruang politik untuk menghadapi tantangannya yang banyak dan kompleks. ASEAN tetap berkomitmen untuk mendukung Myanmar dalam upayanya kembali normal sesuai dengan keinginan masyarakat Myanmar.

Tetap menghormati prinsip non-intervensi, ASEAN menegaskan kembali kepatuhan terhadap supremasi hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional serta perlunya mencapai keseimbangan yang tepat dalam penerapan prinsip-prinsip ASEAN dalam situasi tersebut di Myanmar. ASEAN sepakat untuk menegaskan kembali keputusan yang diambil pada Pertemuan Darurat Menteri Luar Negeri ASEAN (EAMM) pada tanggal 15 Oktober 2021. ASEAN menyatakan pandangan bahwa kesibukan nasional Myanmar tidak boleh mempengaruhi proses pembangunan Komunitas ASEAN dan pengambilan keputusan.

3. KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 pada tanggal 11 November 2022 di Phnom Penh-Kamboja, di bawah Ketetuaan Kerajaan Kamboja, KTT

dipimpin oleh Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen PM Kerajaan Kamboja.

Poin penting pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 mengenai perkembangan Myanmar adalah, pernyataan ASEAN masih sama dengan KTT sebelumnya menyatakan keprihatinan atas krisis politik berkepanjangan termasuk eksekusi 4 aktivis oposisi dan eskalasi kekerasan, ASEAN menyambut baik upaya untuk membantu mengatasi situasi Myanmar termasuk kunjungan ke Myanmar oleh Samdech Techo Hun Sen, PM Kamboja pada Januari 2022, dan oleh HE Mr. Prak Sokhonn, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kamboja sebagai Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar pada bulan Maret dan akhir Juni hingga awal Juli 2022. ASEAN sangat kecewa dengan sedikit kemajuan dan kurangnya komitmen Myanmar untuk implementasi dari Konsensus Lima Poin. ASEAN menegaskan kembali komitmennya terhadap perdamaian dan stabilitas di kawasan dan menyatakan kesiapan ASEAN membantu Myanmar dengan cara positif, damai dan konstruktif. ASEAN juga menyambut baik kunjungan pertama Dr. Noeleen Heyzer sebagai Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Myanmar pada Agustus 2022, dan menegaskan peran penting PBB, ASEAN dan mitra eksternal dalam memfasilitasi Solusi damai di Myanmar. ASEAN mendukung peninjauan dan keputusan pemimpin ASEAN tentang Implementasi Konsensus Lima Poin. Kunjungan ketiga Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar akan membawa kemajuan positif bagi implementasi konsensus lima poin, pengiriman bantuan kemanusiaan dan memperluas kesempatan untuk dialog politik di Myanmar.^{xi}

4. Terselenggaranya KTT ASEAN ke-42 pada tanggal 10-11 Mei 2023 di Labuan Bajo-Indonesia di bawah Keketuaan Indonesia, KTT dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. ASEAN tidak mengundang Myanmar pada KTT kali ini.

Menlu Indonesia tidak memberikan pernyataan spesifik terkait alasan Myanmar tidak diundang. Namun berdasarkan pandangan yang di kemukakan oleh salah satu pengamat politik dari Indonesia (Dinna Wisnu, pengamat internasional Universitas Bina

Nusantara) bahwa sikap ASEAN dilatarbelakangi beberapa negara yang tidak mengakui junta militer sebagai pemimpin resmi di Myanmar. KTT ASEAN hanya mengundang para kepala negara anggota ASEAN. Sedangkan Myanmar saat ini dipimpin oleh junta yang notabene saat ini tidak punya legitimasi, bahkan di dalam negeri sekalipun, jadi bukan memojokkan Myanmar tapi realitanya memang Myanmar tidak punya pemimpin.

Poin penting pada KTT ASEAN ke-40 dan ke-41 mengenai perkembangan Myanmar:

Menegaskan kembali posisi ASEAN yang Bersatu bahwa Konsensus Lima Poin tetap menjadi acuan utama ASEAN, ASEAN mendukung keterlibatan ketua yang berkelanjutan dengan semua pemangku kepentingan di Myanmar untuk menemukan solusi damai dan tahan lama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memfasilitasi dialog nasional yang inklusif. ASEAN mendukung Sebagian bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar pada 7 Mei 2023 meskipun situasi keamanan menantang. ASEAN mengancam keras serangan terhadap konvoi AHA Center dan Tim Pemantau ASEAN di Negara Bagian Shan. ASEAN sangat prihatin dengan eskalasi konflik bersenjata dan kekerasan di Myanmar. ASEAN mendesak penghentian segera segala bentuk kekerasan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengiriman bantuan kemanusiaan dan dialog nasional yang inklusif.^{xii}

Menlu Indonesia menyatakan bahwa 5PC ini harus menjadi satu-satunya rujukan keterlibatan ASEAN dengan junta militer di Myanmar dengan kata lain tidak ada trek pendekatan ASEAN selain 5PC untuk menyelesaikan polemik di Myanmar.

Implementasi Kesepakatan Konsensus ASEAN untuk Myanmar

Implementasi terhadap Konsensus Lima Poin meliputi. **Pertama, Rencana kunjungan Utusan Khusus Ketua ASEAN ke Myanmar.** Pada pertemuan ke 54 para Menteri luar negeri ASEAN (*ASEAN Ministerial Meeting/ AMM*) yang berlangsung pada tanggal 2 Agustus 2021 secara virtual yang dipimpin oleh Brunei Darussalam dengan mengusung tema "*We Care, We Prepare, We Prosper*", pada pertemuan tersebut mengangkat isu

regional dan internasional, diantaranya isu perkembangan di Myanmar. ASEAN menyambut baik komitmen Myanmar terhadap Konsensus Lima Poin untuk segera diimplementasikan. ASEAN melalui Sekretaris Jenderal memutuskan menunjuk Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof untuk membantu penyelesaian krisis Myanmar, memfasilitasi dialog politik di Myanmar antara pihak junta dan NLD sebagai upaya mengumpulkan respons terhadap krisis yang semakin meningkat di Myanmar. ASEAN mendorong utusan khusus agar dapat membangun kepercayaan dan keyakinan dengan akses penuh ke semua pihak terkait dan memberikan batas waktu yang jelas mengenai implementasi Konsensus Lima Poin sebelum pertemuan luar negeri ASEAN berikutnya dilaksanakan. Pada AMM ke 54 ini, ASEAN juga mendesak Myanmar untuk segera menyetujui penunjukan utusan khusus serta pelaksanaan konsensus lima poin yang telah disepakati.

Kedua, Kunjungan pertama utusan khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar pada 7-8 Januari 2022. Ini merupakan kunjungan pertama di tahun 2022. Perdana Menteri Kerajaan Kamboja Hun Sen bertemu dengan kepala junta Jenderal Min Aung Hlaing di ibu kota Naypyidaw didampingi oleh lima Menteri kabinet Kamboja, wakil panglima tertinggi Angkatan Bersenjata, dua wakil Menteri dan satu tim delegasi.^{xiii} Pertemuan bilateral antara kedua belah pihak membahas sejumlah masalah bilateral dan regional yang menjadi perhatian dan kepentingan bersama, kedua pemimpin saling memberi pengarahan tentang perkembangan terakhir di negara masing-masing.

Ketiga, Kunjungan kedua tahun 2022 utusan khusus ketua ASEAN untuk Myanmar pada 30 Juni – 02 Juli 2022. Menugaskan HE PRAK Sokhonn, Wakil Perdana Menteri Kamboja yang didampingi oleh sekjen ASEAN, wakil sekjen ASEAN, anggota kantor utusan khusus Ketua ASEAN dan perwakilan dari sekretariat ASEAN. Inti pembahasan dalam kunjungan utusan khusus berdasarkan tiga prioritas kerja yaitu, pengurangan/ penghentian kekerasan, penyampaian bantuan kemanusiaan. Tujuan dari kunjungan kedua itu dalam rangka menindaklanjuti pertemuan sebelumnya antara Perdana Menteri Hun Sen dan Jenderal senior, serta mendorong kemajuan

implementasi lima poin yaitu penghentian kekerasan, percepatan pengiriman bantuan kemanusiaan, dan program vaksinasi bersama yang disahkan pada pertemuan konsultasi bantuan kemanusiaan ASEAN ke Myanmar pada 6 Mei 2022 di Phnom Penh serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog politik yang inklusif.^{xiv}

Keempat, Bantuan Kemanusiaan Melalui AHA Center Untuk Myanmar. Pertemuan konsultatif pada 6 Mei 2022 di Phnom Penh Kamboja yang diinisiasi oleh Yang Mulia PRAK Sokhon sebagai Ketua ASEAN tahun 2022 dan Sekjen ASEAN dalam kapasitas sebagai Koordinator Bantuan Kemanusiaan ASEAN (SG-AHAC) merupakan bagian dari pelaksanaan Konsensus Lima Poin. Pertemuan tersebut membahas tiga poin utama, yaitu meliputi:

1. Kerangka Kerja Pengaturan Pengiriman Bantuan Kemanusiaan ASEAN
Berkaitan dengan kerangka kerja pengaturan bantuan kemanusiaan ASEAN di Myanmar, anggota tim yang hadir pada pertemuan setuju bahwa AHA Centre akan bekerja sama dengan Satuan Tugas Myanmar yaitu mengidentifikasi negara bagian atau wilayah dalam rangka mengimplementasikan kerangka kerja dimaksud. serta AHA Center akan memfasilitasi dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Masyarakat Myanmar termasuk wilayah Etnis Bersenjata.^{xv}
2. Mengatasi Tantangan Operasional Perusahaan Penyaluran Bantuan Kemanusiaan
Sehubungan dengan perlunya mengatasi tantangan operasional yang ditemukan di lapangan, Satgas Myanmar menyetujui melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka mempercepat pengiriman bantuan kemanusiaan yaitu mendesak AHA Center dan mitra pelaksana untuk menyiapkan dokumen awal yang diperlukan serta memastikan keamanan dan keselamatan staf AHA Center, Tim Pemantau ASEAN dan Tim Satgas.^{xvi}
3. Kerangka Kerja Vaksin COVID-19 Administrasi di Myanmar

Sehubungan dengan usulan kerangka kerja Vaksin COVID-19 di Myanmar, pertemuan tersebut mencatat bahwa kerangka kerja yang diusulkan akan menawarkan ruang bagi para mitra untuk bersama-sama memberikan vaksin COVID-19 kepada warga Myanmar yang membutuhkan secara

aman dan tepat waktu. AHA Center akan melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Kementerian Kesehatan Myanmar, sehubungan dengan identifikasi dan verifikasi negara bagian dan wilayah di Myanmar yang membutuhkan dosis vaksin COVID-19 serta implementasi mitra dalam rangka mendukung distribusi pemberian vaksin di Myanmar.

I. Komitmen Myanmar terhadap Konsensus 5 Poin

No	Utusan Khusus ASEAN	Respon Myanmar (Hasil Pertemuan)
1.	Rencana kunjungan Menteri Luar Negeri II Brunei Erywan Yusof	Junta menolak permintaan Utusan Khusus untuk bertemu pemimpin NLD Aung San Suu Kyi dan para pemimpin lain yang sebelumnya telah diusulkan ke pihak junta militer atas permintaan utusan khusus dalam rencana kunjungannya. Selain tidak menyetujui kunjungan utusan ASEAN dan menolak permintaan utusan khusus untuk bertemu dengan pemimpin NLD, Junta Myanmar juga tidak akan menerapkan konsensus lima poin yang telah disepakati oleh semua negara anggota ASEAN pada 24 April 2021 sampai dengan Myanmar dapat membangun "stabilitas" di Myanmar. ^{xvii}
2.	Kunjungan PM Kamboja Hun Sen (7-8 Januari 2022)	Jenderal Senior Min Aung Hlaing menyampaikan beberapa hal, (1) perkembangan di Myanmar bahwa pemerintah Myanmar telah mendeklarasikan gencatan senjata lima bulan dengan semua Organisasi Bersenjata Etnis (EAO) hingga akhir Februari 2022 dan memutuskan untuk memperpanjang hingga akhir 2022; (2) pimpinan junta meminta semua pihak terkait untuk menerima gencatan senjata demi kepentingan negara dan rakyat, mengakhiri semua tindakan kekerasan dan menahan diri sepenuhnya. Berkaitan dengan gencatan senjata, pimpinan junta menyambut partisipasi utusan khusus Ketua ASEAN untuk bergabung dalam pembicaraan gencatan senjata dengan dan di antara EAO. ^{xviii} Pada prinsipnya pimpinan junta berjanji mendukung dalam memenuhi mandat ASEAN untuk mengimplementasikan konsensus lima poin sesuai dengan Piagam ASEAN.
3.	HE PRAK Sokhonn, Wakil Perdana Menteri Kamboja, sekjen ASEAN, wakil sekjen ASEAN, anggota kantor utusan khusus Ketua ASEAN dan perwakilan dari sekretariat ASEAN (30 Juni-02 Juli 2022)	Kunjungan diterima oleh Jenderal Min Aung Hlaing di Naypyitaw dan dihadiri oleh Ketua Dewan Administrasi Negara (SAC), Ketua Satuan Tugas Myanmar untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN Bersama dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan Sosial. Pertemuan para pihak saling bertukar pandangan tentang pembaruan situasional dan tantangan serta membahas tentang bantuan kemanusiaan Myanmar untuk ASEAN. Utusan khusus juga mengangkat terkait situasi terkini keamanan di Myanmar termasuk kekerasan, kebrutalan dan intimidasi terhadap warga sipil. Jenderal Min Aung Hlaing menginformasikan tentang peningkatan keamanan untuk rakyat dan kesediaannya untuk terlibat langsung dalam perjanjian gencatan senjata nasional, serta menyakinkan utusan khusus atas dukungan penuhnya dalam pemenuhan mandat. ^{xix}
4.	Pertemuan konsultatif di Phnom	Membahas 3 (tiga) poin terkait kerangka pemberian bantuan kemanusiaan melalui AHA Center

	Penh (6 Mei 2023)	
5.	Bantuan Kemanusiaan melalui AHA Center (7 Mei 2023)	Terjadi baku tembak ketika AHA Center menyerahkan bantuan kemanusiaan ke negara Bagian Shan Myanmar.

Tantangan ASEAN dalam Mempromosikan Perdamaian dan HAM di Myanmar

Konsensus Lima Poin yang menjadi kerangka acuan bagi ASEAN dalam rangka mengatasi krisis keamanan dan krisis kemanusiaan di Myanmar tidak membuahkan hasil. Junta Myanmar tidak menunjukkan keinginan untuk melaksanakan atau bekerja sama dengan rencana perdamaian yang disepakati ASEAN untuk Myanmar pada April 2021. Meskipun Myanmar menyetujuinya dalam pertemuan para pemimpin negara Asia Tenggara, Myanmar jauh dari menghormati kesepakatan yang telah di buat bersama. Junta tetap meningkatkan kekerasan untuk menekan pertentangan publik yang meluas terhadap kekuasaannya. Sehubungan dengan peran ASEAN sebagai salah satu organisasi internasional, penulis mengutip teori Clive Archer dalam bukunya yang berjudul "*Internasional Organisations*", dimana Archer menjelaskan peran organisasi internasional, antara lain bertindak sebagai instrument, arena dan aktor. ASEAN sebagai organisasi internasional di kawasan telah melakukan berbagai langkah antara lain diplomasi baik bilateral, multilateral maupun regional, merumuskan perjanjian-perjanjian, merumuskan kesepakatan dalam rangka mengakomodir kepentingan negara anggotanya untuk mencapai kepentingan negara anggotanya.

Keselarasn dengan organisasi internasional dan kerja sama internasional, penulis menggunakan perspektif neoliberalisme. Mendasarkan teori yang disampaikan oleh Vinsensio Dugis (2018), bahwa neoliberalisme hadir mengisi ruang "kegagalan" neorealisme yang sama sekali tidak memprediksi bahwa Perang Dingin dapat berakhir secara damai. Neoliberalisme berkembang melalui teori-teori yang mengkaji tentang pentingnya kerja sama internasional, bahwa organisasi internasional sebagai media kerja sama negara dalam rangka mencapai stabilitas dan perdamaian internasional. Neoliberalisme percaya bahwa kerjasama antar negara adalah mungkin dan dapat

difasilitasi melalui lembaga-lembaga internasional. Lembaga-lembaga ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi serta kepercayaan antar negara.

Lembaga/organisasi internasional dipandang sebagai sebuah alat sekaligus aktor dan menjadi jembatan antar negara dalam melakukan kerja sama mencapai situasi damai, meskipun dalam prakteknya akan muncul konflik dalam kerja sama antar negara, namun organisasi internasional mempunyai tugas sebagai mediator dan pengawas dalam suatu hubungan antar negara. Menanggapi isu Myanmar, ASEAN telah menyepakati Konsensus Lima

Poin/5PC sebagai referensi utama dalam mengatasi krisis di Myanmar. Lima poin yang dimaksud adalah (1) penghentian aksi kekerasan, (2) penyelenggaraan dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai, (3) pembentukan utusan khusus ASEAN untuk memfasilitasi proses dialog dan mediasi, (4) pengiriman bantuan kemanusiaan, dan (5) kunjungan utusan khusus ke Myanmar.

ASEAN sebagai organisasi regional mengemban tugas dalam mencari solusi untuk membantu mengatasi krisis yang terjadi di Myanmar. ASEAN menjadi harapan sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik di Myanmar. Komunitas internasional juga telah berharap penuh pada ASEAN sebagai pihak utama yang bisa merumuskan solusi atas segala krisis

yang terjadi dan mendorong tindakan aktif ASEAN dalam menemukan solusi damai di Myanmar, karena keterlibatan suatu institusi internasional dalam mengatasi konflik baik domestik maupun antar negara dan memberikan pengaruh terhadap perdamaian antar negara, namun dalam prakteknya ASEAN sebagai organisasi internasional tidak dapat menerapkan pola kerja sama untuk menyelesaikan isu Myanmar. Dimana komitmen ASEAN dalam upaya penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar kembali dipertanyakan usai *retreat* Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)

ASEAN ke-43 di Jakarta, 4 September 2023, dalam pertemuan yang ditujukan untuk meninjau ulang implementasi 5PC. Junta militer menolak menerapkan 5PC dan tampaknya sulit untuk mengharapkan ada perkembangan berarti dalam resolusi konflik. Selain terbelenggu prinsip dasar untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggotanya, negara anggota ASEAN juga belum semua bersuara bulat

terhadap isu Myanmar sejak kudeta militer. Sehingga mekanisme penyelesaian konflik Myanmar menjadi tidak efektif dan komitmen terhadap prinsip non intervensi juga mengakibatkan terbatasnya pergerakan ASEAN dalam melakukan intervensi terhadap Myanmar, sehingga pola kerja sama internasional antar negara tidak dapat menjadi kerangka acuan bagi Myanmar untuk mengatasi konflik secara berkelanjutan.

Kesimpulan

Myanmar negara berkembang di Asia Tenggara dengan kesejarahan panjang konflik antar etnis, sistem pemerintahan otoriter di bawah rezim militer, dan kudeta militer berulang yang membuat masyarakat Myanmar hidup di bawah kemiskinan, ketertindasan dan terisolasi dari internasional. Tahun 1948-1962, Myanmar berada di bawah sistem pemerintahan demokrasi parlementer, sejak tahun 1962-1990 Myanmar dalam kekuasaan rezim militer. Tahun 1988 terjadi gerakan pro demokrasi dan unjuk rasa dalam skala besar oleh mahasiswa, masyarakat sipil dan para biksu buddha yang menolak kekuasaan militer, gerakan ini menghasilkan ketidakstabilan regional, atas desakan masyarakat dan dunia internasional, Myanmar melakukan transisi demokrasi. Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1990, memenangkan partai NLD (partai pendukung demokrasi), pemilu damai tidak terlaksana dan terjadi kudeta militer, tahun 2010 pemilu kembali terlaksana dimenangkan oleh partai USDP (partai bentukan militer), pemilu berikutnya tahun 2015 dimenangkan NLD dengan pemimpin yang dibatalkan karena tidak sesuai dengan aturan dalam konstitusi 2008, 5 tahun kemudian tepatnya pada 8 November 2020 pemilu kembali dilaksanakan, dimenangkan oleh partai NLD namun tidak diakui oleh partai oposisi (militer) karena dianggap banyak kecurangan sehingga terjadi kudeta. Kepemimpinan Myanmar diambil alih junta militer, militer menahan para pemimpin NLD, mengumumkan keadaan darurat selama 1 tahun kedepan dalam rangka menjaga stabilitas negara dan berjanji akan melaksanakan pemilu demokratis setelah keadaan stabil. Pasca kudeta militer, terjadi unjuk rasa oleh massa pro demokrasi yang di tanggapi militer dengan

tindak kekerasan dan penembakan secara brutal kepada masyarakat sipil.

Negara-negara di kawasan dan dunia internasional prihatin, mengancam bahkan mengutuk tindakan junta militer yang mengambil alih kekuasaan dan melakukan tindak kekerasan dan kesewenang-wenangan terhadap masyarakat sipil Myanmar yang menuntut dikembalikannya kekuasaan *de facto*. ASEAN sebagai organisasi regional, menjadi forum bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara ikut bertanggung jawab atas isu politik dan krisis kemanusiaan di Myanmar. ASEAN secara cepat merespon atas isu Myanmar dan segera melakukan berbagai upaya dalam mengatasi krisis politik keamanan dan kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN segera diselenggarakan pasca kudeta, dimana para pemimpin negara-negara anggota melakukan pertemuan darurat pada 24 April 2021 dan di hadiri oleh semua pemimpin negara anggota ASEAN termasuk junta militer, hasil dari pertemuan tersebut telah disepakatinya Konsensus Lima Poin sebagai langkah ASEAN dalam mengatasi konflik Myanmar. **Isi dari Konsensus Lima Poin antara lain** (1) kekerasan di Myanmar harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya; (2) dialog konstruktif di antara semua pihak terkait harus dimulai untuk mencari Solusi damai demi kepentingan rakyat; (3) utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog, dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN; (4) ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; (5) utusan dan delegasi khusus akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

Belum ada kemajuan signifikan dari implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN untuk penyelesaian krisis Myanmar, junta militer menolak melaksanakan isi dari 5PC sampai dengan Myanmar dapat membangun stabilitas di Myanmar. Kesatuan dan kekompakan organisasi internasional ASEAN dibutuhkan untuk merumuskan langkah-langkah kedepan, 5PC tetap menjadi acuan dalam penyelesaian krisis di Myanmar, tetap menghormati prinsip non intervensi, kepatuhan terhadap supremasi hukum, tata pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional. ASEAN terus berupaya agar ada langkah maju mendorong implementasi 5PC

melalui keterlibatan dengan berbagai pihak, mendorong terciptanya dialog yang inklusif kemudian menyerukan penghentian kekerasan dan memfasilitasi penyelesaian lewat *joint assessment* melalui AHA Center. Persoalan Myanmar tidak boleh menjadi hambatan bagi ASEAN untuk melanjutkan agenda lain berkaitan dengan percepatan pembangunan komunitas ASEAN.

Daftar Pustaka

1. (IR), A. A. (2013). Promoting Democracy in Myanmar: Political Party Capacity Building. *Institute for Security and Development Policy*.
2. Archer, C. (2001). *International Organisations 3rd Edition*. Routledge, Taylor & Francis Group.
3. Ashley South, M. L. (Ed.). (n.d.). *Citizenship in Myanmar: Ways of Being in and from Burma*. ISEAS – Chiang Mai University Press.
4. Bjarnegard, E. (2020). Introduction: Development Challenges in Myanmar: Political Development and Politics of Development Intertwined.
5. Chandra Purnama, W. D. (2019, Juli-Desember). Democratic Transition and Reflection on Indonesia's Efforts to Encourage Democratization in Myanmar. *JISPOL*, 9.
6. Cheesman, N. (2015). *Opposing the Rule of Law: How Myanmar's Courts Make Law and Order*. UK.
7. CONGRESS.GOV. (n.d.). *H.R. 5497 - BURMA Act of 2021*. 117th Congress (2021-2022).
8. Dugis, V. (2016). Teori Hubungan Internasional "Perspektif-Perspektif Klasik". Cakra Studi Global Strategis.
9. Dugis, V. (Ed.). (2018). *Teori Hubungan Internasional (Perspektif - Perspektif Klasik) Edisi Revisi* (Vol. 23). Surabaya: Airlangga University Press.
10. Dulal, R. (2013, October). Countervailing Conflict Intervention as a (Potentially Preventable) Prisoner's Dilemma Outcome. *Munich Personal RePEc Archive*, 35, 1-10.
11. Edition, N. K. (2021). *Democratisation of Myanmar*. Routledge India.
12. Egreteau, R. (2015). Myanmar: transition, praetorian politics, and the prospects for democratic change. Routledge.
13. Epstein, R. A. (2011). Direct Democracy: Government of the People, by the People, and for the people. *Chicago Unbound*.
14. Farrelly, A. S. (2020). Interrogating contemporary Myanmar: the difficult transition.

15. Fuady, M. (2010). *"Konsep Negara Demokrasi"*. Bandung: PT Refika Aditama.
16. Grugel, J. (2002). Democratization: a critical introduction. Palgrave.
17. Haggard, S. (2013). Liberal Pessimism: International Relations Theory and the Emerging Powers. *Asia & the Pacific Policy Studies*, 1(1), 1-17.
18. Harrington, A. I. (2016). Power, Violence, and nuclear weapons. *Critical Studies on Security*.
19. Hasan, M. (2021). The Indo-Pacific Strategy: Promoting Democracy in South Asia. *Georgetown Journal of Internasional Affairs*.
20. Haynes, J. (n.d.). Routledge Handbook of Democratization. 2012: Routledge.
21. Heraclides, A. (2016). Intervention and Non-Intervention in Classical International Political Theory: Immanuel Kant and J.S. Mill (Vol. 2). *International Journal of Political Science (IJPS)*.
22. Htut, Y. (2019). Myanmar's Political Transition and Lost Opportunities (2010-2016). ISEAS - Yusof Ishak Institute.
23. Huntington, S. P. (1991-1992). *How Countries Democratize* (Vol. 106). The Academy of Political Science.
24. J. Atsu Amegashie, E. K. (2006). (Non)intervention in intra-state conflict. *European Journal of Political Economy*, 754-767.
25. Jangai Jap, A. Z. (2020). "Ethnic Parties in New Democracies: The case of Myanmar 2015". *Electoral Studies*.
26. Jegat, J. (2015). Democratic Peace Theory, Power, and Economic Interdependence. *E-International Relations*.
27. Jegat, J. (2015). Democratic Peace Theory, Power, and Economic Interdependence. *E-International Relations*.
28. Jones, L. (2014, January 28). Explaining Myanmar's regime transition: the periphery is central. *Democratization*, 21, 2014(5).
29. Kelling, M. F. (2010). A Historical Approach to Myanmar. *Journal of Asia Pacific Studies*, 1, No 2, 132-148.
30. Kipgen, N. (2017). *Democratisation of Myanmar*. Routledge India.
31. Kironksa, K. (August 2014). *Democratic Transition in Myanmar - Fact or Sham?* (Vol. 5). Taiwan: International Journal of Recent Scientific Research. Retrieved from <http://www.recentscientific.com>
32. Komnas Ham. Jurnal HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Tahun 2014. Hal. V. <https://www.komnasham.go.id/files/20190425-jurnal-ham-vol-11-tahun-2014-SUFZK.pdf> diakses pada 27 April 2022. (n.d.).
33. Ladd, J. M. (2021). Party strength and party weakness in transitional elections: Myanmar's National League for Democracy in 2015. *Democratization*.
34. Lee, L. (2019). Democracy Promotion: Anzus and The Free and Open Indo-Pasific Strategy. *The United States Studies Centre*.
35. Lewis, P. G. (2007). *Theories of democratization and patterns of change in Eastern Europe* (Vol. 13). *Journal of Communist Studies and Transition Politics*.
36. Marco Bunte, P. K. (2020, April 27). Taking Stock of Myanmar's Political Transformation since 2011. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*.
37. Nick Cheesman, N. F. (Ed.). (2016). *Conflict in Myanmar: War, Politics, Religion*. ISEAS-Yusof Ishak Institute.
38. Nursahid, A. (2012). *Apakah Demokrasi Membawa Perdamaian*. PUSAD (Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan Wakaf Paramdina). <https://www.paramadina-pusad.or.id/apakah-demokrasi-membawa-perdamaian/>.
39. Paziienza, T. A. (2014). Challenging the Democratic Peace Theory - The Role of US-China Relationship. *scholar commons*.
40. Philosophy, S. E. (first published Thu Jul 27, 2006; substantive revision Wed Jul 7, 2021). Democracy.
41. Placek, K. (2012). The Democratic Peace Theory. *E-International Relations*.
42. President, C. G. (2004). Democracy promotion: the relationship of political parties and civil society. *Democratization*, 11(3), 27-35.
43. Rikki Dean, J. P. (2019). What Is Democratic Theory. *Journals New York - Oxford*.
44. Roman David, I. H. (2018). *Liberalism and democracy in Myanmar*. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.
45. Rosato, S. (2003). The Flawed Logic of Democratic Peace Theory. *The American Political Science Review*, 97, 585-602. Retrieved from <https://www.jstor.org/stable/3593025>
46. Samuel P. Huntington, p. A. (1995). *Gelombang demokratisasi ketiga*. (A. S. Abadi, Ed.) Pustaka Utama Grafiti-Jakarta.
47. Sanders, Y.-M. C. (2009, April 09). Raising the cost of rebellion: the role of third-party intervention in intrastate conflict. *Defence and Peace Economics*, 20(3), 149-169.
48. Saru, A. (December 2022). Abuse of Human Rights in Myanmar: An Urgent Appeal to Reinterpret the ASEAN Non-Interference Principle. *Human Rights in the Global South*.

49. Selth, A. (2019). *Secrets and Power in Myanmar: Intelligence and the Fall of General Khin Nyunt*. ISEAS - Yusof Ishak Institute.
50. Sorensen, G. (1993). *Democracy and Democratization: Processes and Prospects in a Changing World*. Denmark: Avalon Publishing.
51. Tan, A. (2021, August 18). A Critical Assessment of Human Rights Diplomacy by Western States in Myanmar (Burma) From 2007 to 2020. *Asian Affairs*, 52,2021(3), 655-687.
52. Tan, B. S. (n.d.). *International Aid and Democracy Promotion* 1st Edition. Routledge.
53. Thawngmung, A. M. (2003, May/June). Preconditions and Prospects for Democratic Transition in Burma/Myanmar. *Asian Survey*, XLIII.
54. Tom Lundborg, S. D. (2019). The ethics of neorealism: Waltz and the time of international life. *European Journal of International Relations*, 25, 229 - 249.
55. UNDP, W. B. (Juni 2019). *Poverty Report: Myanmar Living Conditions Survey 2017*.

- ⁱ Jap, Jangai; Ziegfeld, Adam (1 June 2020). "Ethnic Parties in New Democracies: The Case of Myanmar 2015". *Electoral Studies*. https://jangaijap.files.wordpress.com/2020/07/ethnic_parties_in_new_democracy.pdf
- ⁱⁱ Cliver Archer. 2001. "International Organization". Routledge 11 New Fetter Lane, London. Hal. 68
- ⁱⁱⁱ "History of Burma", <http://www.cfob.org/HistoryofBurma/historyOfBurma.shtml>
- ^{iv} San oo Aung, '1gth Anlyersiry of Military coup' , Burma Digost, 14 September 2oo7 ,
- ^v David l. steinberg, Burma: rtre sfafe of Myanmar, Georgetown University piess, washington, D.C.,2001, hal. 1-17.
- ^{vi} Jap, Jangai; Ziegfeld, Adam (1 June 2020). "Ethnic Parties in New Democracies: The Case of Myanmar 2015". *Electoral Studies*. https://jangaijap.files.wordpress.com/2020/07/ethnic_parties_in_new_democracy.pdf
- ^{vii} <https://eastasiaforum.org/2024/02/27/poverty-and-conflict-cripple-myanmars-post-coup-economy/>
- ^{viii} Channel News Asia, "ASEAN chair Brunei calls for 'dialogue, reconciliation and return to normalcy' in Myanmar", 1 Feb 2021.
- ^{ix} <https://rumahpemilu.org/kudeta-myanmar-dan-pe-rebutan-ruang-demokrasi/>
- ^x <https://www.cnnindonesia.com/inter-nasional/20211016125206-106-708618/pemimpin-junta-myanmar-resmi-tak-diundang-ke-ktt-asean> .
- ^{xi} Chairman's Statement of The 40th and 41th ASEAN SUMMITS, Phnom Penh, Cambodia, on 11 November 2022.
- ^{xii} Chairman's Statement of The 42th ASEAN SUMMITS, Labuan Bajo, Indonesia, 10-11 May 2023.
- ^{xiii} AFP/ National Television of Cambodia, "Cambodian PM Hun Sen meets Myanmar junta chief amid widespread protests", Benar News, Januari 2022. <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/meeting-starts-01072022190938.html>
- ^{xiv} PRESS RELEASE, "Outcomes of the Second Visit of the Special Envoy of the ASEAN Chair on Myanmar to the Republic of the Union of Myanmar, on 30 June-02 July 2022", ASEAN CAMBODIA 2022.
- ^{xv} PRESS RELEASE, "On the Outcomes of the Consultative Meeting on ASEAN Humanitarian Assistance to Myanmar", ASEAN CAMBODIA, Mei 2022. <https://reliefweb.int/report/myanmar/press-release-outcomes-consultative-meeting-asean-humanitarian-assistance-myanmar-6>
- ^{xvi} Ibid
- ^{xvii} Neelakantan Shailaja, "ASEAN Officials Meet Myanmar Junta Chief, Present Names of Envoy Candidates", Benar News, 2021. <https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/sea-mn-meeting-06062021104533.html>
- ^{xviii} PRESS RELEASE, "On the Visit of Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Prime Minister of the Kingdom of Cambodia, to the Republic of the Union of Myanmar, 07-08 Januari 2022. Kingdom of Cambodia, 2022. <https://www.mfaic.gov.kh/posts/2022-01-07-Press-Release-Joint-Press-Release-on-the-Visit-of-Samdech-Akka-Moha-Sena-Padei-Techo-HUN-SEN-Prime-Minister-of-th-22-48-32>
- ^{xix} PRESS RELEASE, "Outcomes of the Second Visit of the Special Envoy of the ASEAN Chair on Myanmar to the Republic of the Union of Myanmar, on 30 June-02 July 2022", ASEAN CAMBODIA 2022.